

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI NTB**

*Analysis Of The Factors That Cause Delays In The Preparation Of Financial
Reports At The Regional Financial And Asset Management Agency (BPKAD) Of
The NTB Province*



OLEH :

KIKI OKTRIA FITRIANDHANI

21512A0098

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB
SKRIPSI

Disusun oleh:

KIKI OKTRIA FITRIANDHANI
21512A0098

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 17 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Drs. H. Abdurrahman, M.M
NIDN. 0804116101

Pembimbing Pendamping,

Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE.M.Ak
NIDN. 0807058301

Mengetahui :
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua

Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M.
NIDN. 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB”**

Oleh :

KIKI OKTRIA FITRIANDHANI

21512A0098

Naskah Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan :

Mataram, 17 Juli 2019

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dewan Penguji

1. Pembimbing Utama (Ketua)

Drs. H. Abdurrahman, M.M

NIDN. 0804116101

2. Pembimbing Pendamping (Anggota II)

Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE, M.Ak

NIDN. 0807058301

3. Penguji/Penetrals (Anggota III)

Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom

NIDN.0831128310

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Drs. AMIL, M.M

NIDN. 0831126204

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Oktria Fitriandhani
NIM : 21512A0098
Tempat / Tanggal Lahir : Pelitamasa, 17 Oktober 1997
Konsentrasi : Perbankan
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Instansi : Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan
Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 17 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Kiki Oktria Fitriandhani

NIM. 21512A0098

RIWAYAT HIDUP



Penulis berasal dari Dusun Pelitamasa Desa Kelawis Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Besar dan lahir di Pelitamasa pada tanggal 17 Oktober 1997, sebagai putri ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Andus Surbani dan Ibu Komalasari. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kelawis pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SPM N 1 Orong Telu lulus pada tahun 2012 Dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Orong Telu lulus pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sebagai Mahasiswa Strata 1 (S1) Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terbaik.
2. Ayahanda tercinta bapak Andus Surbani dan ibunda tersayang ibu komalasari yang selalu mengiringi setiap langkah dengan doa-doa dan support yang tiada henti. Terimakasih untuk selama ini mama bapak sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sampai berada dititik ini, tidak pernah mengeluh sedikitpun walau banyak sekali rintangan dan cobaan yang di hadapi selama ini. Doakan saya semoga bisa mebahagiakan mama dan bapak walaupun sebenarnya saya tidak akan mampu membalas semua jasa mama dan bapak.
3. Orang tua kedua, bibi dan paman (Titi Fulyanti. S.Ag dan Is Sukiman, S.Pd) Yang slalu ada dan memberikan nasehat-nasehat yang membangun. Selalu mendukung baik dari segi materi maupun moril.

4. Kaka satu-satunya Cici Novia Putri Uldhani. S.Kh yang slalu mendukung dan memberikan doa terhadap apa yang saya lakukan slama itu kearah yang positif.
5. Adik-adik saya Alya Cahya Sukmana, Dwina maysifa Sukmana teman brantem tapi sayang. Maaf kakak belum bisa menjadi panutan yang baik buat kalian.
6. Untuk semua keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya slama ini.
7. Untuk Kk Redhi Putra Wawantoro. S. Farm yang selalu memberikan support dan membantu mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabat Jannah (Abang Jhon Ganteng, Kakak Mae Imut, Kakak Maya Manja , Kakak Ifa Komodo, Kakak Opy Ndut, Kakak Iza Suka Bikin Kesel) Mega Plores , Kakak Lisa) Dan Sahabat-Sahabat Saya Baiq Arisma Agustiani, Aini Rahayu yang selalu membantu.
9. Almamater Universitas Muhammadiyah.

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad)

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka iya berada di jalan Allah hingga iya pulang”

(HR. Turmudzi)

“Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan di berikan ilmu diantara kalian beberapa derajat, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”.

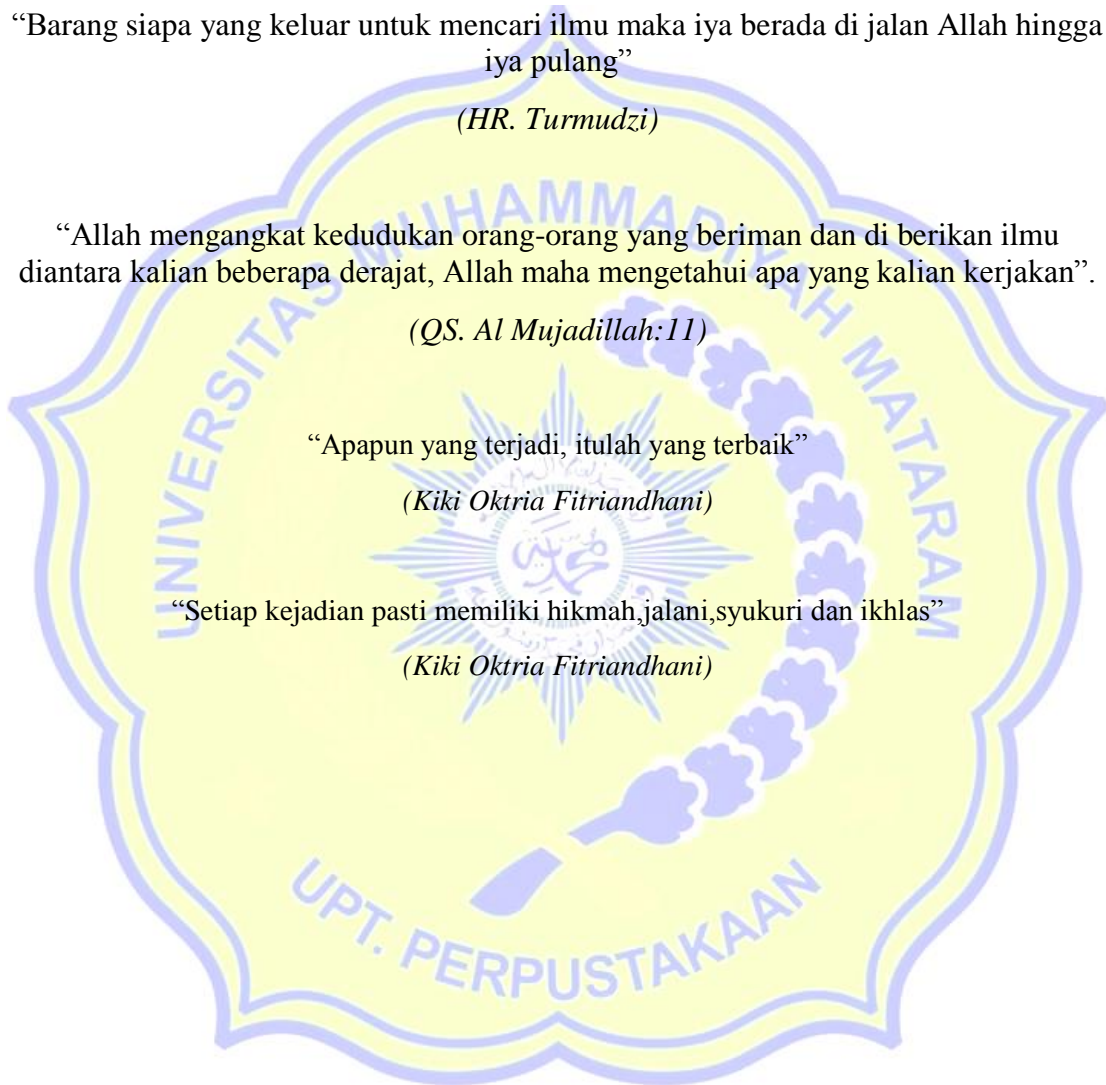
(QS. Al Mujadillah:11)

“Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik”

(Kiki Oktria Fitriandhani)

“Setiap kejadian pasti memiliki hikmah, jalani, syukuri dan ikhlas”

(Kiki Oktria Fitriandhani)



ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI NTB

Kiki Oktria Fitriandhani, 21512A0098, konsentrasi Perbankan, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Pembimbing Utama Drs. H. Abdurrahman, MM, Pembimbing Pendamping Baiq Reinelda Tri Yinarni, SE., M.Ak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode analisi kualitatif dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan yaitu teknologi informasi yang sering mengalami eror dan wewenang dan prosedur pencatatan yang masi memberikan kesempatan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bidang Akuntansi BPKAD belum menerapkan sanksi yang tega atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan SKPD.

Kata Kunci : Faktor-Faktor Keterlambatan, Laporan Keuangan, Teknologi Informasi, System Wewenang Dan Prosedur Pencatatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT CAUSE DALAYS IN THE PREPARATION OF FINANCIAL REPORTS AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAJEMENT AGENCY (BPKAD) OF THE NTB PROVINCE

Kiki Oktria Fitriandhani, 21512A0098, Concentration In Banking, Business Administration, Faculty Of Social And Political Sciences, Muhammadiyah Of Mataram, Principal Advisor Drs. H. Abdurrahman, MM, Advisor For Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE. M.Ak. This Study Aims To Determine The Factors That Couse Delays In The Preparation Of Financial Statements At The Regional Financial And Asset Manajemen Agency (BPKAD) Of NTB Province.

The formulation of the problem in this study are the factors that caused the delay in the preparation of financial reports at the regional financial and asset manajement agency (BPKAD) of the NTB Province. The purpose of this study was to determine the factors that caused delays in the regional financial and asset manajement agency (BPKAD) of the NTB Province. The technique of collecting data through field studies in the form of interviews and documentation. The process of data analysis uses qualitative analysis methods by giving a description of the explanation of the factors that cause delays in the preparation of financial statements in the regional financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the NTB Province. This type of research uses descriptive research.

The results of this study are in the preparation of financial statements there are several factors that cause delays, namely information technology that often experiences errors and authority and recording procedures that still provide opportunities for SKPD that are late in submitting financial reports. Accounting Field BPKAD has not applied sanctions that bear the burden of late submission of SKPD financial reports.

Keyword : Factors Of Delay, Financial Statements , Information Technology, Authority Systems And Recording Procedures.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Serta tidak lupa pula shalawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat Gelar S1 (S1) di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Amil., M.M
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.sos, M.M selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman., M.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, saran, dan bimbingan secara intensif dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni. SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu penulis memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menghrapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

Mataram, 17 Juli 2019

Kiki Oktria Fitriandhani
21512A0098

DAFTAR ISI

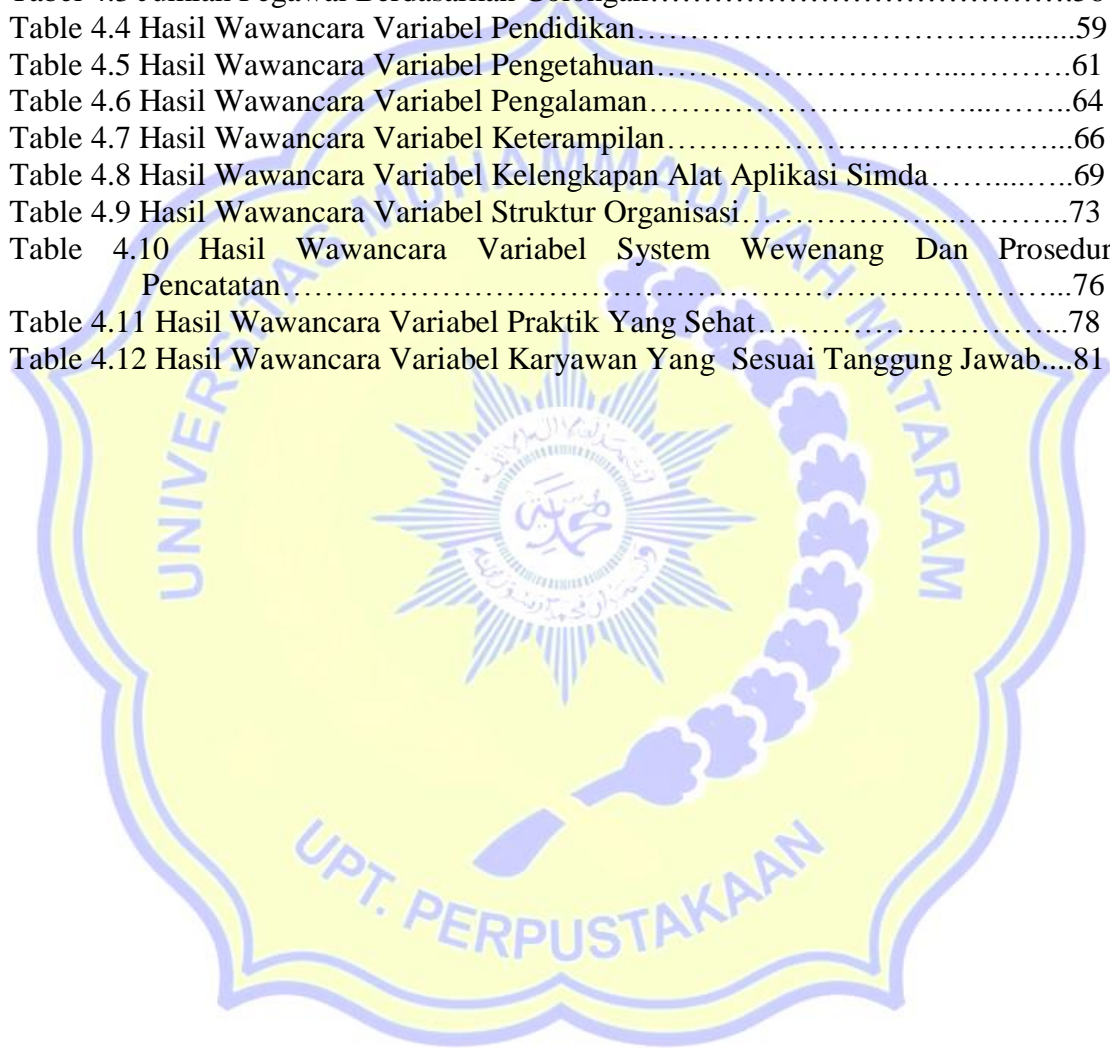
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	11
2.2.2 Komponen Laporan Keuangan	12
2.2.3 Penggunaan Laporan Keuangan	16
2.2.4 Tujuan Pelaporan Keuangan.....	17
2.2.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	18
2.2.6 Peranan Pelaporan Keuangan	19
2.2.7 Pelaporan APBD Oleh SKPD.....	21
2.2.8 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaporan	23
2.3 Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Operasional Variabel.....	35
3.4 Teknik Penentuan Narasumber	36
3.5 Sumber Data.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Jenis dan Teknik Analisis Data.....	38
3.6.1 Jenis Data.....	38
3.6.2 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	40

4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Provinsi NTB	40
4.1.2 Visi dan Misi.....	41
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Analisis Sumber Daya Manusia.....	58
4.2.2 Teknologi Informasi	68
4.2.3 Pengendalian Intern Akuntansi	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar SKPD Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.....	4
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sekaran Dan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Yang Meuduki Jabatan.....	55
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarakan Tingkat Pendidikan.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	56
Table 4.4 Hasil Wawancara Variabel Pendidikan.....	59
Table 4.5 Hasil Wawancara Variabel Pengetahuan.....	61
Table 4.6 Hasil Wawancara Variabel Pengalaman.....	64
Table 4.7 Hasil Wawancara Variabel Keterampilan.....	66
Table 4.8 Hasil Wawancara Variabel Kelengkapan Alat Aplikasi Simda.....	69
Table 4.9 Hasil Wawancara Variabel Struktur Organisasi.....	73
Table 4.10 Hasil Wawancara Variabel System Wewenang Dan Prosedur Pencatatan.....	76
Table 4.11 Hasil Wawancara Variabel Praktik Yang Sehat.....	78
Table 4.12 Hasil Wawancara Variabel Karyawan Yang Sesuai Tanggung Jawab....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik pemerintahan Indonesia dituntut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen yang penting untuk dapat memberikan informasi kepada publik agar dapat dijadikan sebagai fungsi informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa informasi yang telah disajikan oleh pemerintah daerah dapat bermanfaat jika informasi dapat disajikan, terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik-keputusan, diantaranya adalah: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit. Adapun komponen-komponen laporan keuangan pada SKPD yang disampaikan tersebut meliputi (a) laporan Realisasi Anggaran LRA, (b) Laporan Operasional (LO), (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas LPE, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyampaian laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Peraturan perundang-undangan memberikan bukti tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh SKPD kepada BPKAD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Perlakuan Undang-undang tentang akuntansi pemerintah yang ada ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sektor

pemerintah. Terbukti banyaknya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang seharusnya batasan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa batasan waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya SKPD ke BPKAD selambat lambatnya 2 bulan yaitu 28 februari dan BPKAD ke BPK Provinsi 3 bulan yaitu 31 maret dihitung sejak akhir tahun anggaran agar hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai batasan waktu yang ada.

Menurut hasil observasi, Laporan keuangan yang disampaikan SKPD ke BPKAD Provinsi NTB terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD, bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat sering kali terjadi masalah keterlambatan penyusunan laporan keuangan, hal ini disebabkan ada beberapa faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi atau kerumitan dalam menjalankan suatu tugas suatu entitas pelaporan. Kompleksitas operasi tersebut seperti tugas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompleksitas operasi BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti kerumitan dalam penyajian laporan keuangan, sumber daya manusia di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing, dan teknologi informasi yang belum dimanfaatkan oleh BPKAD dengan baik.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKAD provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun masih terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pada tahun 2017 yang mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada BPKAD dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar SKPD yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2017

No	SKPD	Tanggal		Selisih Jumlah Hari
		Batas Akhir	Waktu Penyampaian	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7 Maret 2017	7
2.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		8 Maret 2017	8
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	28 Februari	12 Maret 2017	12
4.	Dinas Perhubungan		6 Maret 2017	6
5.	Dinas Perdagangan		11 Maret 2017	11
6.	Dinas Kesehatan Prov. NTB		13 Maret 2017	13
7.	Dinas Sosial		12 Maret 2107	12

Sumber: data sekunder yang di olah dari BPKAD Prov. NTB

Tabel di atas menunjukkan penyampaian laporan keuangan SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan dengan baik, seperti terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Dari 5 SKPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata terlambat 10 hari. Salah satu faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya tersebut ke BPKAD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat”**.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan dan ruang lingkup agar terfokus pada sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Objek penelitian terbatas pada analisis faktor-faktor Penyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Subjek penelitian terbatas pada faktor-faktor penyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Lokasi penelitian dilakukan hanya pada Badan Peengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengetahuan bagi penulis tentang faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2013) berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis komparatif mengenai analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Manado. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum selesai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan PP No.24 Tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah), karena belum menerapkan secara keseluruhan konsep laporan keuangan, yaitu tidak adanya catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Adapun penyebab keterlambatan laporan keuangan dikarenakan kurangnya peraturan-peraturan pemerintah daerah, kurangnya

koordinasi dengan pemkot, dan seringnya keterlambatan pengumpulan dokumen-dokumen/nota dari setiap bidang.

Penelitian yang dilakukan oleh Keyza Yunita (2015) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan atas Pelaporan Pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan menggunakan variabel penelitian: 1. SDM (seperti pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan) dan 2. IT (seperti teknologi dan perlengkapan dokumen serta sistem informasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan atas pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab keterlambatan atas pelaporan pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, dan keterampilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Esry Yonetha Klaenoni (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2014-2016.

Adapun variabel penelitian: 1. Sumber daya manusia 2. Manajemen waktu 3. Teknologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2015. yang menjadi Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif-kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah sumber daya manusia, manajemen waktu dan teknologi.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu

Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
Veronica (2013)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado	1. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif	1. Terletak pada metode pengumpulan data pada penelitian terdahulu menggunakan metode observasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 2. Variabel penelitian

Keyza Yunita (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan atas Pelaporan Pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 2. Variabel penelitian yang diteliti terdiri dari SDM dan IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak pada metode pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan metode koesioner sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 2. Pada peneliti terdahulu meneliti 2 variabel sedangkan peneliti sekarang 3 variabel
Esry Yonetha Klaenoni (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengan Selatan Tahun 2014-2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian yang diteliti terdiri dari SDM, IT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-kuantitatif. 3. Terletak pada metode pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan metode koesioner sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi

Sumber: Data sekunder yang di olah dari BPKAD Prov. NTB

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Laporan keuangan

Indra (2007:63) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan

kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Abdullah (2007:63) laporan keuangan adalah laporan keuangan yang diharapkan bias member informasi mengenai perusahaan atau lembaga pemerintahan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, kondisi ekonomi, bias memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan resiko lembaga tersebut.

2.2.2 Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan financial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Jenis laporan keuangan pemerintah ini mengandung empat unsur, antara lain:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer

d. Pembiayaan (*financing*)

2. Laporan Perubahan Saldo

Dalam kaitannya dengan laporan perubahan saldo anggaran laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan tau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara itu dalam PSAP nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa laporan perubahan SAL menyajikan komperatif dengan periode sebelumnya, antara lain:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuanga satu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Didalam laporan neraca, ada tiga unsur yang harus ada didalamnya, antara lain:

- a. Asset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

4. Laporan Operasional

Merupakan jenis laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsure laporan, antara lain:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Transfer
- d. Pos luar biasa

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional. Investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari dua unsure, antara lain:

- a. Penerimaan kas
- b. Pengeluaran kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAP Nomor 1, laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- d. Ekuitas akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendaha Umum Negara dan Entitas Pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Mardiasno (2009:171), pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*) yang terdiri dari mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. kemudian ada pula hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan public. Terakhir yaitu hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Setiap pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut merupakan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2009:172).

1. Masyarakat pengguna pelayanan public membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang mereka bayarkan kepada pemerintah.
3. Kreditor dan investor membutuhkan laporan keuangan untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen (SIM) untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja organisasi.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan akan informasi yang berbeda-beda, dikarenakan setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan pemerintah.

2.2.4 Tujuan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah

seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat, bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.2.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan bahwa pelaporan keuangan pemerintah

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang dibidang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, yang mengatur Keuangan Daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Daerah.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.2.6 Peranan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai, dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset. Kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan, untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2.7 Pelaporan APBD Oleh SKPD

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada SKPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD tersebut terdiri dari, laporan realisasi anggarannya, dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan SKPD dilampirkan dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian dan standard akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut terdiri dari, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya, telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah disampaikan laporan hasil audit, Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

2.2.8 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaporan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan bahwa ketetapan waktu kegunaan laporan keuangan berkurang, bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Factor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi atau kerumitan dalam menjalankan suatu tugas suatu entitas pelaporan, bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Kompleksitas operasi tersebut seperti manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dapat diketahui bahwa penyebab keterlambatan atau ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi.

1. Sumber Daya Manusia

Mulyadi (2009 : 130) Sumber daya manusia memiliki potensi untuk dijadikan sebagai unggulan dalam persaingan.

Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Hanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain. Sedangkan Sedarmayanti (2007:286) sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber

dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power) yang melekat pada manusia itu sendiri dalam arti dapat ditunjukkan dalam hal tenaga, daya, kemampuan, kekuatan, keberadaan, peranan, wewenang dan tanggung jawab memiliki kemampuan (competency) yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude).

Alimbudiono (2004 : 75), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi Jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugas- tugasnya dengan baik. sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, kompetensi keahlian, pelatihan dan pengembangan serta pengalaman yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability), untuk melakukan suatu pekerjaan (Havesi,2005:71). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendnasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan

yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Kualitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan harus ditempatkan di dalam suatu konteks dinamis dengan kondisi-kondisi kerangka yang berubah. Pengembangan sumber daya manusia khususnya kualitas pegawai merupakan upaya terencana meningkatkan kualitas individu dan organisasi yang dapat secara aktif menunjang perbaikan situasi dan kondisi di masa yang akan datang.

Pendapat-pendapat tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dan tentunya yang lebih dibutuhkan bagi organisasi adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik. Karena semakin tinggi kualitas manusia yang dimiliki suatu organisasi akan semakin memberikan kekuatan guna mencapai tujuan organisasi.

a. Pendidikan

Pendidikan bagi karyawan sangat perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan suatu organisasi. Agar prinsip *The right man on the right place* dapat diterapkan. Pada umumnya para pegawai sangat mengharapkan agar mereka ditempatkan sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diikuti dan dikuasai. Siagian (2004 : 65) menyatakan bahwa ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam manajemen sumber daya manusia. Apabila tidak diterapkan akan berakibat pada rendahnya produktivitas dan mutu kerja,

tingkat kemungkinan yang cukup tinggi, keinginan yang besar dibarengi oleh kepuasan kerja yang rendah. Adanya ketepatan dalam penempatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kinerja pegawai yang baik dan memuaskan. Siagian (2004 : 45) pendidikan dapat bersifat formal, akan tetapi dapat pula bersifat non formal. Pendidikan yang bersifat formal ditempuh melalui tingkat — tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak — kanak hingga perguruan tinggi, bagi sebagian orang, pendidikan di lembaga pendidikan tinggi terjadi di ruang kelas dengan program yang pada umumnya "structured". Dipihak lain, pendidikan yang sifatnya non formal bisa terjadi dimana saja karena sifatnya "unstructured".

b. Pengalaman

Siagian (2004 : 15), yang dimaksud pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung.

Mengenai ini Siagian (2004 16) mengemukakan bahwa pengalaman langsung adalah apabila seseorang telah bekerja pada satu organisasi di masa lalu oleh karena meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti Oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari pada organisasi dimana peristiwa

yang diamati dan diikuti itu terjadi. Pengalaman merupakan kemampuan setiap orang untuk beradaptasi terhadap perbedaan dan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

c. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan proses dan usaha manusia untuk tahu akan sesuatu yang dapat diperoleh dengan cara mempelajari sesuatu. Pengetahuan merupakan khasanah mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita atau sumber jawaban berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan.

Dalam organisasi berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan organisasi, pengetahuan merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan karena dengan pengetahuan dapat membuat setiap orang mengetahui dan memahami keadaan lingkungan sekitarnya, demikian pula bagi aparat pemerintah yang tugasnya selalu dihadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal tersebut, seperti yang dikemukakan Siagian (2004 : 28), yaitu

- 1) Raison d'etre serta tujuan organisasi dimana seseorang menjadi anggota
- 2) Filsafat yang dianut oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.
- 3) Jenis barang atau jasa apa yang harus dihasilkan oleh organisasi.
- 4) Chentele groups yang harus dilayani oleh organisasi.
- 5) Ilmu dan bidang spesialisasi apayang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.
- 6) Teknologi yang sudah, sedang dan akan dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi.
- 7) Misi apa yang harus diemban oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.
- 8) Makna dan hakekat tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan.
- 9) Jenis kegiatan operasional yang harus diselenggarakan.

10) Sarana mekanis apa yang terdapat dan atau diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

d. Keterampilan

Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat. Keterampilan adalah kecakapan atau kecekatan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan, sifatnya lebih mengarah pada kecakapan teknis.

Siagian (2004:12) mengatakan bahwa keterampilan adalah kemampuan kerja manusia dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan atau kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan dengan cepat, tepat dan mudah.

2. Teknologi Informasi

Rustam (2013) bahwa teknologi informasi seperti adanya bantuan Komputer, volume transaksi pemerintah yang begitu besar dan kompleks dapat segera diproses, sehingga para pegawai dapat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan

untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi (pemerintah daerah) sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pastinya akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Kelengkapan alat dan Aplikasi SIMDA, menurut Mcleod (2010: 11) “Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis computer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*) yaitu sesuatu yang mampu mengelola data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi computer yang terintegrasi dan dapat membantu

proses administrasi pemerintah daerah dan tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMD terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* trintegrasi, sehingga *outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan.

3. Pengendalian Intern Akuntansi

Mulyadi (2006: 10) sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi, semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan. Bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Pembagian tanggung jawab dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip yaitu harus dipisahkan bagian-bagian operasi dan penyampaian dari bagian akuntansi. Bagian operasi

adalah bagian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- b. Sistem wewenang dan prosedur wewenang pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

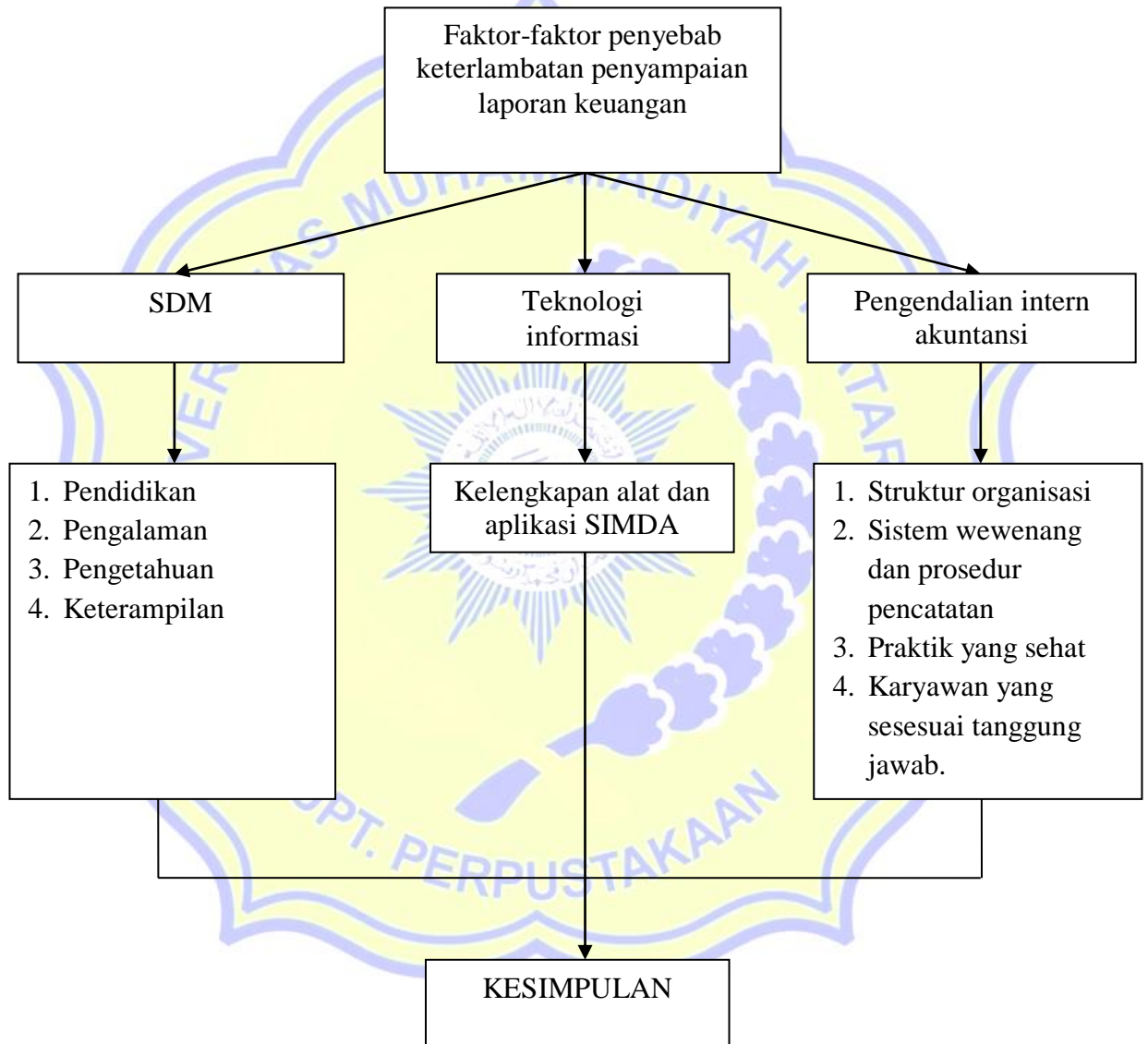
Cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan atau lembaga dalam menciptakan praktik yang sehat salah satunya adalah dengan penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

- d. Karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dapat melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.

Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan yang sesuai dengan tuntunan perkembangan pekerjaan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdiri dari tiga bagian yaitu, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi. Sumber Daya Manusia memiliki empat indikator yaitu: pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan. Teknologi informasi memiliki 2 indikator yaitu kelengkapan alat dan aplikasi SIMDA. Sedangkan pengendalian intern akuntansi memiliki 4 indikator yaitu struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Menurut Sugiono (2009:53-55) Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya satu variable atau lebih..

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB yang berlokasi di Jln. Pejanggik No.14 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kode pos 83127. Phone:(0370) 627689,625345 Fax:(0370) 627677. Waktu penelitian dimulai sejak Tanggal 5 November sampai dengan Tanggal 25 Mei 2019.

3.3 Operasional Variabel

Table 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan		
1. Sumber Daya Manusia	Potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social	1. Pendidikan 2. Pengalaman 3. Pengetahuan 4. Keterampilan

	yang mampu atau mengelola dirinya sendiri.	
2. Teknologi Informasi	Teknologi informasi yang dikembangkan dalam pemerintah atau yang disebut dengan SIMDA yang penggunaannya dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.	1. Kelengkapan alat dan aplikasi SIMDA
3. Pengendalian Intern Akuntansi	Perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.	1. Struktur Organisasi 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 3. Praktik yang sehat 4. Karyawan yang sesuai tanggung jawab.

Sumber: Data sekunder yang diolah dari BPKAD Prov. NTB

3.4 Teknik Penentuan Narasumber

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2008:218) Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang

dianggap mengetahui permasalahan yang akan di kaji serta mampu memberikan yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan di bidang Akuntansi. Di bidang akuntansi terdapat 15 karyawan akan tetapi peneliti disini memilih 5 karyawan yang dianggap mampu meberikan informasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan jabatan.

3.5 Sumber Data

Data yang digunakn dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan komunikasi menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pegawai BPKAD Provinsi NTB. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh langsung dari BPKAD Provinsi NTB.

Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (tidak melalui prantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literature, dan arsip.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pegawai BPKAD Provinsi NTB. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang diperoleh langsung dari BPKAD Provinsi NTB.

Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Jenis dan teknik Analisi Data

3.6.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Menurut Sugiyono (2009: 13-14) analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Jenis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tehnik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.